

***COLLABORATIVE GOVERNANCE SEBAGAI SOLUSI DALAM TATA KELOLA
PEMBERDAYAAN NELAYAN***

***COLLABOARTIVE GOVERNANCE AS A SOLUTION IN FISHERMAN EMPOWERMENT
GOVERNANCE***

Karjuni Dt. Maani

Jurusan Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Padang,
Jl. Prof Dr. Hamka, Air Tawar Barat, Padang, Indonesia, 25132

Email: karjuni.dtmaani@fis.unp.ac.id

Hidayatul Fajri

Jurusan Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Padang,
Jl. Prof Dr. Hamka, Air Tawar Barat, Padang, Indonesia, 25132

E-mail: hidayatulfajri@fis.unp.ac.id

Nila Wahyuni

Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Andalas,
Limau Manis, Pauh, Padang, Indonesia, 25175

E-mail: nilawahyuni@soc.unand.ac.id

Hasbullah Malau

Jurusan Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Padang,
Jl. Prof Dr. Hamka, Air Tawar Barat, Padang, Indonesia, 25132

E-mail: hasbullahmalau@fis.unp.ac.id

Abstrak

Salah satu metode tata kelola yang ada saat ini adalah kolaboratif. Kolaborasi dinilai mampu menghimpun para pemangku kepentingan dalam kelembagaan yang secara efektif untuk menyelesaikan masalah, seperti masalah dalam melakukan pemberdayaan sosial. Artikel ini bertujuan untuk menelaah peluang tata kelola kolaboratif di dalam pengelolaan pemberdayaan sosial di daerah pesisir di Kabupaten Pesisir Selatan. Selama ini pengelolaan pemberdayaan sosial, baik dari perencanaan maupun implementasi, masih berpusat kepada pemerintah dan belum melibatkan stakeholder lain di luar pemerintah seperti masyarakat dan dunia usaha. Dengan menggunakan data sekunder dilakukan pendekatan multi-kriteria sistematis untuk mengkaji peranan stakeholder yang dianggap memiliki kepentingan di dalam pengelolaan pemberdayaan nelayan di Kabupaten Pesisir Selatan. Data tersebut kemudian diolah dengan menggunakan analisis stakeholder dan analisis jaringan sosial untuk mengetahui kemampuan stakeholder di dalam membangun jaringan kolaborasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa stakeholder yang ada memiliki tujuan, langkah-langkah dan kemampuan yang berbeda di dalam melihat keberadaan program pemberdayaan nelayan dan terlibat di dalamnya. Hasilnya, menemukan, bahwa model tata kelola pemberdayaan nelayan yang ideal adalah kegiatan pemberdayaan sosial yang mampu mengakomodasi kepentingan banyak pihak dalam relasi yang setara. Penelitian ini merekomendasikan agar dibentuknya tata kelola kolaboratif antar stakeholder dalam pemberdayaan nelayan di Kabupaten Pesisir Selatan.

Kata Kunci: Pemberdayaan Nelayan, Persepsi Pemangku Kepentingan, Analisis Stakeholder, Analisis Jaringan Sosial, Tata kelola Kolaboratif.

Abstract

One of the current governance methods is collaborative governance. Collaboration is considered to be capable of compiling stakeholders in the institutions that effectively solve problems, such as: social empowerment. This article examines opportunities for collaborative governance in the management of social empowerment in coastal areas in Pesisir Selatan Regency. So far, the management of social empowerment, both from its planning and its implementation, is still centralized on the government and it has not involved other stakeholders out of the government, such as the community and the business sector. Using secondary data, a systematic multi-criteria approach is used to examine the role of stakeholders who are interested in managing fishermen empowerment in Pesisir Selatan Regency. The data are then processed by using stakeholder analysis and social network analysis to determine the ability of stakeholders to build collaborative networks. The study results indicate that the existing stakeholders have different goals, steps, and skills in viewing the existence of the fishermen empowerment program and being involved in it. The result found that the ideal fisherman empowerment governance model is a social empowerment activity that can accommodate the interests of many parties in an equal relationship. This study recommends the establishment of collaborative governance among stakeholders in empowering fishermen in Pesisir Selatan Regency.

Keywords: Fisherman Empowerment, Stakeholder Perceptions, Stakeholder Analysis, Social Network Analysis, Collaborative Governance.

PENDAHULUAN

Sektor kelautan dan perikanan selama ini sering kali menjadi sektor yang tidak strategis dan nyaris terpinggirkan (*peripheral sector*) dalam perencanaan maupun implemntasi pembangunan nasional Indonesia (Indarti, 2015). Kondisi ini tentu sebuah ironi sebab 70 persen atau 6.315.222 km² wilayah Indonesia merupakan lautan yang membuat Indonesia menjadi negara yang berbentuk kepulauan terbesar di dunia. Ditambah dengan panjang garis pantai yang dimiliki Indonesia, yaitu 99.093 km, menjadikan Indonesia sebagai negara dengan garis pantai terpanjang nomor dua di dunia (BIG, 2017)

Kondisi geografis yang seperti itu tentunya menyimpan potensi ekonomi yang sangat besar (Lasabuda, 2013). Penilaian Potensi yang dilakukan oleh (Pustek Kelautan UGM, 2005) dan (Sahubawa et al., 2015) memperkirakan potensi kelautan Indonesia memiliki nilai 136,5 milyar dolar AS yang mencakup antara lain nilai dari perikanan 31,9

milyar dolar AS; wilayah pesisir lestari 56,0 milyar dolar AS; bioteknologi 40,0 milyar dolar AS; wisata 2,0 milyar dolar AS dan migas 6,6 milyar dolar AS.

Pada tahun 2013 Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia yang berasal dari perikanan laut hanya 2,34 persen (BPS, 2014), dan stagnan pada angka 2,33 persen dari tahun 2010-2012. (RI, 2011) menyatakan bahwa jumlah penduduk miskin di wilayah pesisir mencapai 7.879.468 orang atau 25 persen dari jumlah masyarakat miskin di Indonesia. Di mana diantaranya 2,17 juta orang berprofesi sebagai nelayan. Sedangkan jumlah penduduk yang bergantung kepada kepala rumah tangga yang berprofesi sebagai nelayan berjumlah 5,6 juta orang.

Upaya mengatasi kemiskinan di kalangan nelayan dikembangkan program pengembangan kapasitas masyarakat lewat pemberdayaan masyarakat yang melibatkan multi-sektor (Ratnawati & Sutopo, 2014). Tetapi beranjak dari permasalahan yang selama ini ada, banyak program pemberdayaan yang telah dilakukan

oleh pemerintah dan lembaga-lembaga donor internasional tidak memberikan efek seperti yang diharapkan (Soeprijadi et al., 2013). Salah satu program yang diupayakan oleh pemerintah adalah melalui Program PEMP (Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir) yang menyoal nelayan tradisional yang memiliki alat tangkap di bawah 30 GT, nelayan-buruh, pedagang dan pengolah ikan yang berskala kecil, pembudidaya ikan yang berskala kecil, serta pengelola sarana penunjang usaha perikanan berskala kecil. Adapun program ini dikelola oleh Direktorat Jenderal Pesisir dan Pulau-pulau Kecil dan dilaksanakan oleh Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten/Kota.

Program PEMP pertama kali dilaksanakan pada tahun 2000 di 26 kabupaten pada 7 provinsi dan pada tahun 2001 diperluas menjadi 125 Kabupaten/Kota di 30 Provinsi (Perikanan, 2001). Namun upaya tersebut seringkali gagal karena pemerintah tidak memahami kompleksnya permasalahan yang membelenggu nelayan (Suhartini et al., 2005).

Beberapa penelitian yang dilakukan oleh (Kartasmita, 1996), (Bono, 2000) dan (IDEO, 2010) menunjukkan bahwa kegagalan pemberdayaan diakibatkan oleh beberapa hal seperti, 1) Belum cukup memahami akar permasalahan sehingga gagal di dalam menuntaskannya; 2) Solusi cenderung berbentuk satu arah yang berasal dari pemerintah dan kajian-kajian pakar tetapi cenderung mengabaikan partisipasi dari masyarakat; 3) Hasil yang diinginkan seringkali berupa *improvement* bukan *innovation*; 4) Solusi yang ditawarkan cenderung meminimalisasi aneka variasi yang muncul di lapangan; 5) Pendekatan yang digunakan cenderung *High Modernism*; 6) Program pemberdayaan seringkali berubah sewaktu-waktu; 7) Seringkali yang tercipta “status quo”.

Kabupaten Pesisir Selatan merupakan daerah yang memiliki garis pantai terpanjang kedua di Provinsi Sumatera Barat. Panjang garis pantai daerah ini adalah 278,2 km. Selain itu, Kabupaten ini merupakan daerah dengan nelayan terbanyak di Provinsi Sumatera Barat. Namun, banyak nelayan di Kabupaten Pesisir Selatan yang berada pada kondisi miskin (Maani et al., 2018; Syahrizal et al., 2012). Hal ini salah satunya diakibatkan oleh pengelolaan pemberdayaan yang belum maksimal (Zamzami, 2011).

Pengelolaan pemberdayaan nelayan di Kabupaten Pesisir Selatan sudah berjalan dalam waktu yang lama. Tetapi pengelolaan pemberdayaan cenderung bersifat festival tahunan dan tidak berkelanjutan. Selain itu juga bersifat *government-sentris* di mana pemerintah menjadi pemain utama bahkan tunggal di dalam pengelolaan pemberdayaan tanpa melibatkan peran pihak *non-government* seperti swasta atau *private sector*. Pelibatan *stakeholder* yang lebih luas dituntut untuk pemberdayaan yang lebih optimal (Achyar et al., 2017; Shafique & Warren, 2018). Sehingga, menjadi suatu hal yang penting untuk mengetahui persepsi dari *stakeholder* tentang tata kelola pemberdayaan nelayan serta solusi di dalam tata kelola yang dapat mewujudkan kesejahteraan nelayan.

Berdasarkan latar belakang yang diungkap di atas, maka tujuan tulisan ini adalah menganalisis tata kelola pemberdayaan nelayan yang dari sudut keterlibatan *stakeholder* dengan menggunakan *Stakeholders Analysis* dan *Social Network Analysis* sebagai alat analisis. Selanjutnya tulisan ini akan melakukan refleksi teoritis dengan menjadikan tata kelola kolaboratif sebagai model.

PEMBAHASAN

Tinjauan Konsep Analisis Stakeholder

Pemangku kepentingan (*stakeholders*) merupakan sekelompok orang atau lembaga

yang memiliki perhatian maupun kepentingan dan pengaruh di dalam suatu permasalahan yang ada (Fajri et al., 2019; Fletcher, 2000). Sedangkan, Gonsalves et al (2005) mendefinisikan bahwa yang disebut sebagai pemangku kepentingan adalah pihak-pihak yang memberikan *impact* maupun yang terkena *impact* dari kebijakan, program dan kegiatan pembangunan. Pihak-pihak tersebut bukan saja berbentuk badan dan lembaga formal tetapi dapat juga berupa perorangan (laki-laki atau perempuan), masyarakat, komunitas sosial ekonomi, ataupun lembaga dari berbagai dimensi dalam berbagai strata masyarakat. Sehingga, pemangku kepentingan dapat dikategorikan juga sebagai pelaku (Iqbal, 2007).

Pemangku kepentingan (*stakeholders*) dapat dibedakan dalam dua bentuk yaitu *stakeholder* primer atau utama dan *stakeholder* sekunder atau pelengkap (Wakka, 2014). *Stakeholder* utama disebut juga sebagai pemangku kepentingan kunci atau *key stakeholders*. Sedangkan *stakeholder* sekunder adalah pemangku kepentingan yang memiliki kepentingan terhadap suatu sumberdaya atau permasalahan namun kepentingan tersebut terjadi secara tidak langsung (Yang et al., 2010).

Selanjutnya, untuk memahami perspektif dari para pemangku kepentingan yang terlibat dapat dilihat dari kepentingan dan pengaruh yang mereka miliki. Pengaruh dapat didefinisikan sebagai kekuatan (*power*) yang dimiliki para pemangku kepentingan di dalam mengontrol, mempengaruhi, mengubah atau menghambat suatu program atau kebijakan. Sedangkan kepentingan adalah kedudukan ataupun kewenangan maupun keperluan yang dimiliki (Reed et al., 2009).

Sehingga, analisis stakeholder yang akan digunakan pada artikel ini merupakan model yang dibangun oleh Reed et al (2009), yaitu model yang mampu menganalisis keterlibatan

pemangku kepentingan dari faktor pengaruh (*influence*) dan kepentingan (*interest*) yang mereka miliki.

Tinjauan Konsep Analisis Jejaring Sosial

Jaringan sosial adalah sebagai struktur yang terdiri dari simpul-simpul yang dapat berupa individu, kelompok, organisasi yang terkait dan terhubung satu sama lain melalui nilai, visi, ide bersama, kontak sosial, kepentingan.

Sebagai sebuah metode di dalam penelitian, *Social Network Analysis* (SNA) atau Analisis Jaringan Sosial pertama kali diperkenalkan oleh seorang antropolog John A. Barnes. Barnes memandang bahwa interaksi sosial adalah sebuah model yang dapat dilihat sebagai “sekelompok poin yang dikombinasikan dengan garis” yang kemudian dapat membentuk suatu hubungan “jaringan total” yang dapat menggambarkan jaringan sosial di antara mereka (Can & Alatas, 2019).

Sebuah jaringan sosial terdiri dari struktur yang berisikan aktor (sebagai poin) dan hubungan mereka dengan satu sama lain (sebagai garis). Sehingga jaringan sosial dapat ditampilkan sebagai gambaran dari sebuah jaringan yang terdiri dari sekelompok *node* (atau anggota sistem sosial) dan satu set tautan yang menunjukkan hubungan di antara aktor yang ada (Knoke & Yang, 2008).

Oleh karena itu Analisis Jaringan Sosial disebut sebagai studi analisis yang dilakukan dengan tujuan untuk mengungkapkan informasi terkait simpul dan relasi dalam jaringan sosial. Sehingga dengan pemahaman yang baik terhadap jaringan sosial dapat memberikan informasi terkait prediksi kemungkinan hubungan antara aktor dalam jaringan, relasi yang ada di antara mereka, ekstraksi pola dari perilaku aktor, dan deteksi komunitas yang tidak dapat dilihat dengan penelitian kualitatif ataupun statistik sederhana (Shen et al., 2021).

Tinjauan Konsep Tata Kelola Kolaboratif

Saat ini konsep tentang *governance* sedang menjadi *mainstream* di dalam kajian administrasi publik. *Governance* berkembang karena pergeseran paradigma yang terjadi di dalam Administrasi Publik. Saat ini *governance* digunakan sebagai sinonim untuk kata pemerintah atau untuk memenuhi syarat aktivitasnya (Ikeanyibe et al., 2017).

Sebenarnya konsep *governance* juga bukan konsep yang baru. Beberapa *review* yang kami lakukan mendapati bahwa *governance* sudah dipergunakan sejak akhir 1980-an dan 1990-an. Namun begitu penggunaannya dilakukan secara massif dengan fokus yang berbeda-beda. Beberapa *term* dari *governance*, diantaranya: *corporate governance* (Shah et al., 1992), *New Public Management* (Osborne, 1993), *Good Governance* (World Bank, 1992), *Socio-cibernatic System* (Kooiman, 1993), *Network Governance* (Rhodes, 2007), *New Public Governance* (Smith & Smyth, 2010), *Multi-level Governance* (Hooghe & Marks, 2014), *Governance Partnership* (Visseren-Hamakers & Glasbergen, 2007), *Collaborative Governance* (Ansell & Gash, 2008; Emerson et al., 2012; Mah & Hills, 2012), *Deliberative Governance* (Dryzek, 2010), *Sound Governance* (Farazmand, 2004), ataupun *Democratic governance* (Bevir, 2010).

Berbeda dari awal penggunaannya di tahun 1980-an, sekarang *governance* atau tata kelola menemukan makna barunya yaitu sebagai *partnership*, *collaboration*, dan *networks* (Ikeanyibe et al., 2017) dengan penekanan pada keterlibatan pemangku kepentingan (*stakeholder*) di dalam tata kelola yang ada, baik pemangku kepentingan berupa *government body* ataupun *non-government body*.

Governance dengan model ini menuntut terlibatnya pemangku kepentingan dalam proses

pengambilan keputusan kolektif secara formal, berorientasi konsensus dan musyawarah (Berket et al., 2013). Oleh sebab itu, sesuai dengan tujuan penelitian kami, maka dalam artikel ini kami menggunakan model *collaborative governance* sebagai refleksi teoritis di dalam melihat tata kelola pemberdayaan nelayan.

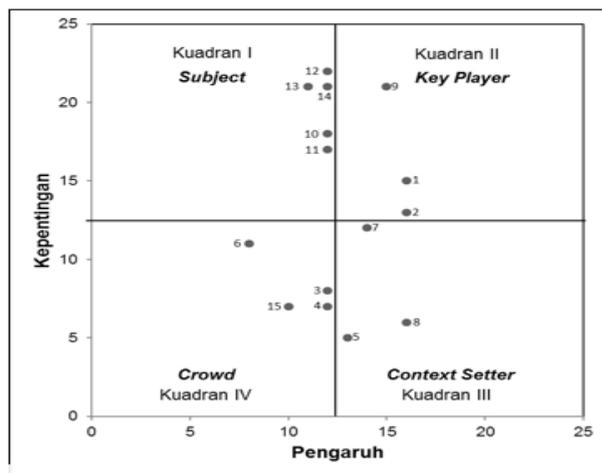
Konsep *collaborative governance* yang kami gunakan adalah konsep yang dikembangkan oleh Ansell & Gash (2008) dan Emerson et al (2012). Definisi tentang *collaborative governance* yang kami gunakan seperti yang dijelaskan oleh Ansell dan Gash, yaitu:

“A governing arrangement where one more public agencies directly engage non-state stakeholder in a collective decision-making process that is formal, consensus-oriented, and deliberative and that aims to make or implement public policy or manage public programs or assets (Ansell & Gash, 2008).”

Tidak seperti Ansell dan Gash, Emerson et al memberikan definisi yang sedikit berbeda tentang *collaborative governance* dilihat dari formalitas forum kolaborasi, inisiasi penyusunan, dan *engagement* yang terjadi antara pemangku kepentingan pemerintah dan non-pemerintah (Emerson et al., 2012). Jika Ansell dan Gash memberikan batasan bahwa forum kolaborasi lebih *state-oriented*, Emerson et al tidak membatasi forum kolaborasi sebagai inisiasi dari pemerintah saja tetapi juga aktor di luar pemerintah. Namun begitu prinsip kunci dari *collaborative governance* adalah pekerjaan pemerintah baik dalam hal perumusan kebijakan (Fajri et al., 2020) implementasi, pemberian layanan di berbagai tingkatan (global, nasional ataupun lokal) harus berbentuk kemitraan yang inklusif antara pemerintah, sektor swasta dan masyarakat sipil.

Analisis *Stakeholder* dalam Pengelolaan Pemberdayaan

Sebelum menentukan *stakeholder* yang terlibat dan berkepentingan di dalam pengelolaan pemberdayaan nelayan di Kabupaten Pesisir Selatan yang kami lakukan adalah melakukan klasifikasi *stakeholder*. Klasifikasi bertujuan untuk menggambarkan pihak sesuai dengan atribut yang mereka miliki dalam pengelolaan pemberdayaan. Atribut yang kami gunakan adalah ukuran pengaruh dan kepentingan. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Maani et al (2018) dan Jumiati & Fajri (2018) kami mengidentifikasi sebanyak 15 *stakeholder* yang berkepentingan dan berpengaruh di dalam pengelolaan pemberdayaan nelayan di Kabupaten Pesisir Selatan (lihat gambar 1).



Gambar 1. Matriks Pengaruh dan Kepentingan *Stakeholder* di dalam Pengelolaan Pemberdayaan Nelayan di Kabupaten Pesisir Selatan

Sumber: Diolah dari Penelitian Maani et al (2018), Jumiati dan Fajri (2019) dan observasi lapangan.

Keterangan:

1= Dinas Perikanan dan Kelautan Prov. Sumbar, 2= Dinas Perikanan Kab. Pesisir Selatan, 3= Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kab. Pesisir Selatan, 4= BAPPEDA Kab. Pesisir Selatan, 5= Kesekretariatan Daerah Kab. Pesisir Selatan, 6= BBIP Teluk Buo, 7= PPP Carocok, 8= DPRD Kab. Pesisir Selatan, 9= Wali Nagari, 10= Badan Musuwarah Nagari, 11= Tokoh Masyarakat,

12= Kelompok Nelayan, 13= Koperasi Nelayan, 14= Nelayan, 15= Pengusaha

Berdasarkan hasil tersebut maka *stakeholder* yang ada dikelompokkan ke dalam empat bagian yaitu *key player*, *subject*, *context setter*, dan *crowd*. *Key player* merupakan kelompok-kelompok yang memiliki kepentingan dan pengaruh yang tinggi dalam pengelolaan pemberdayaan nelayan di Kabupaten Pesisir Selatan. Pihak-pihak yang dikategorikan sebagai *key player* yaitu, Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Sumatera Barat, Dinas Perikanan Kabupaten Pesisir Selatan, dan Wali Nagari.

Pihak-pihak ini menjadi pihak yang berpengaruh dan berkepentingan karena merupakan pihak-pihak yang paling bersentuhan langsung dengan nelayan. Di mana diantaranya disebabkan kepentingan dari fungsi regulasi yang memberikan kewenangan terhadap mereka, seperti Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Sumatera Barat dan Dinas Perikanan Kabupaten Pesisir Selatan yang merupakan OPD (Organisasi Perangkat Daerah) yang memmanifestasikan pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten di dalam melakukan pemberdayaan terhadap nelayan kecil dan pembudidayaan ikan kecil sesuai dengan perintah Peraturan Pemerintah (PP) Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2015 tentang Pemberdayaan Nelayan Kecil dan Pembudidayaan Ikan Kecil.

Mereka juga memiliki pengaruh yang tinggi karena memiliki organisasi yang mampu untuk mempengaruhi pihak-pihak lain di dalam pengelolaan pemberdayaan. Sedangkan wali nagari memiliki pengaruh yang tinggi karena mereka memiliki merupakan pihak yang paling dekat berhubungan dengan nelayan. Selain juga kepentingan yang tinggi dari sisi ekonomi, sosial, dan budaya. Persepsi kelompok ini merupakan persepsi yang paling berpengaruh di

dalam pengelolaan pemberdayaan nelayan di Kabupaten Pesisir Selatan.

Kategori yang kedua adalah *Subject*. Pihak yang berada pada posisi ini mempunyai kepentingan yang tinggi namun di sisi lain mempunyai pengaruh yang rendah. Pihak-pihak yang dikategorikan sebagai *subject* di dalam pengelolaan pemberdayaan nelayan di Kabupaten Pesisir Selatan adalah kelompok nelayan, koperasi nelayan, nelayan, Badan Musyawarah Nagari (BMN), dan tokoh masyarakat. Dari kelima pihak tersebut terlihat bahwa semuanya berasal dari non-pemerintahan. Kelompok nelayan, koperasi nelayan, dan nelayan mempunyai kepentingan yang tinggi di dalam pengelolaan pemberdayaan karena mereka merupakan pihak-pihak yang paling merasakan dampak dari keberhasilan dan kegagalan pemberdayaan nelayan di Kabupaten Pesisir Selatan. Mereka merupakan *users* dari kegiatan pemberdayaan nelayan. Kepentingan mereka terutama pada fungsi ekonomi, ekologi, dan sosial budaya. Sedangkan BMN dan tokoh masyarakat memiliki kepentingan yang tinggi dari segi fungsi sosial dan budaya. Pihak-pihak *subject* ini karena bentuknya adalah non-pemerintah sehingga memiliki kekuatan yang rendah untuk mempengaruhi pihak lain di dalam kegiatan pemberdayaan. Persepsi mereka cenderung menjadi persepsi yang marginal di dalam pengelolaan pemberdayaan nelayan di Kabupaten Pesisir Selatan.

Kategori yang ketiga yaitu *context setter*. Kategori ini merupakan kelompok yang memiliki pengaruh yang tinggi namun memiliki kepentingan yang rendah di dalam pengelolaan pemberdayaan nelayan di Kabupaten Pesisir Selatan. Pihak yang berada pada kategori ini yaitu, Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) Carocok, DPRD Kabupaten Pesisir Selatan, dan Kesekretariatan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan. Pihak ini mampu untuk mempengaruhi pengelolaan pemberdayaan nelayan karena

memiliki kelembagaan yang kuat dengan sumberdaya manusia, regulasi, serta anggaran yang mereka miliki. PPP Carocok memiliki kepentingan yang diatur oleh regulasi sebagai tempat kontak nelayan tangkap (buruh) dengan pemilik kapal, sebagai tempat awal untuk mempersiapkan distribusi produksi perikanan melalui penyediaan tempat pelelanaan ikan, sebagai dermaga kapal, dan sebagai penanganan mutu ikan. Sedangkan DPRD secara institusi merupakan pihak yang mampu mempengaruhi pengelolaan pemberdayaan yang ada karena fungsi mereka sebagai lembaga perwakilan masyarakat dan kemampuan mereka di dalam mempengaruhi kebijakan yang ada. Kesekretariatan Daerah Sumatera Barat merupakan organisasi daerah yang mengelola pemerintahan daerah secara administratif. Namun, pengaruh yang mereka miliki tidak sejalan dengan kepentingan yang mereka punyai di dalam pengelolaan pemberdayaan nelayan. Sehingga pihak-pihak tidak terlalu partisipatif di dalam pengelolaan pemberdayaan nelayan. Persepsi mereka hanya sebatas kepentingan yang mereka miliki.

Sedangkan kategori yang terakhir yaitu *crowd*. Kelompok yang berada pada kategori ini memiliki tingkat kepentingan dan pengaruh yang rendah di dalam pengelolaan pemberdayaan nelayan di Kabupaten Pesisir Selatan. Pihak-pihak itu terdiri dari, Balai Benih Ikan Pantai (BBIP) Teluk Buo, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Pesisir Selatan, Bappeda Kabupaten Pesisir Selatan, dan Pengusaha. Pihak-pihak ini merupakan pihak yang memiliki perhatian dengan pengelolaan pemberdayaan nelayan di Kabupaten Pesisir Selatan tetapi tidak terlibat secara langsung. Sehingga, persepsi dari kelompok ini cenderung tidak terlalu berpengaruh ke dalam persepsi pihak-pihak yang terlibat di dalam pengelolaan pemberdayaan nelayan di Kabupaten Pesisir

Selatan. Padahal, mereka merupakan pihak yang memiliki kapasitas untuk itu. BBIP Teluk Buo merupakan pihak yang mengembangkan bibit ikan yang nantinya akan digunakan oleh nelayan untuk kegiatan budidaya. Bappeda merupakan organisasi daerah yang memiliki otoritas di dalam mengembangkan wilayah, menyusun rencana pembangunan, dan menyusun rencana anggaran. Pengusaha merupakan pihak-pihak yang harusnya dilibatkan ke dalam pengelolaan pemberdayaan. Fungsi mereka sebagai pasar yang menampung hasil tangkapan ataupun budidaya nelayan sangat menentukan dari segi ekonomi.

Hasil analisis *stakeholder* memperlihatkan bahwa hubungan yang ada diantara pihak tidak setara dari kepentingan dan pengaruh. Hal ini memberikan dampak pada aliran informasi yang kemudian membentuk persepsi umum dari semua pihak di dalam pengelolaan pemberdayaan nelayan. Instansi pemerintah menjadi entitas tunggal yang kemudian mempengaruhi persepsi yang ada di dalam pengelolaan (Ilham et al., 2017). sehingga, jika dilihat dari analisis *stakeholder* maka persepsi dari *key player*, yaitu Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Sumatera Barat, Dinas Perikanan Kabupaten Pesisir Selatan, dan Wali Nagari/Nagari merupakan pihak-pihak yang persepsi paling mempengaruhi pengelolaan pemberdayaan nelayan yang telah ada maupun yang akan dilakukan di Kabupaten Pesisir Selatan.

Analisis Jaringan Sosial (*Social Network Analysis*) *Stakeholder*

Untuk menganalisis lebih lanjut tentang relasi yang terjadi di antara *stakeholder* yang ada di dalam pemberdayaan nelayan di Kabupaten Pesisir Selatan, kami menggunakan analisis jaringan sosial sehingga bisa menggambarkan pola interaksi yang ada antar *stakeholder*.

Analisis Jaringan Sosial bertujuan untuk mendapat gambaran mengenai pola interaksi yang terjadi antar pihak. Analisis ini berguna untuk mempelajari dan menjelaskan fenomena sosial serta menyediakan kerangka kerja yang inovatif dalam menganalisis dimensi sosial dari sistem sosial-ekologi (Alonso Roldán et al., 2015). Analisis Jaringan Sosial atau *Social Network Analysis (SNA)* dilakukan dengan cara membuat matriks biner berpasangan bujursangkar antar *stakeholder*. Matriks ini berisi tentang relasi informasi antar aktor yaitu '1' untuk kondisi jika terdapat relasi informasi yang signifikan dan '0' untuk kondisi jika tidak terdapat relasi informasi yang signifikan.

Pola interaksi yang dianalisis di dalam penelitian ini yaitu relasi informasi antar *stakeholder*. Artinya pihak yang paling mungkin berjejaring dengan pihak lain adalah pihak yang mampu memiliki inisiasi dan untuk membentuk tata kelola yang melibatkan semua *stakeholder* pemberdayaan nelayan ke dalam suatu jaringan pengelolaan secara bersama.

Aspek yang dipilih dalam melakukan SNA merujuk kepada yang pernah dilakukan oleh Prell et al (2009) yaitu dengan melakukan analisis untuk melihat *density* dan *centralization* (*degree centrality* dan *betweenness centrality*). *Density* merupakan proporsi hubungan yang mungkin hadir dalam jaringan, dan kepadatan jaringan ini umumnya digunakan untuk mengukur hubungan semua pemangku kepentingan satu sama lain di dalam jaringan. Tingkat derajat keterhubungan dapat dilihat dari skor kepadatan. Skor 1 menunjukkan bahwa semua pihak dalam jaringan secara langsung memiliki hubungan satu sama lain, dan skor kepadatan 0 menunjukkan jika hubungan dalam jaringan sepenuhnya terputus.

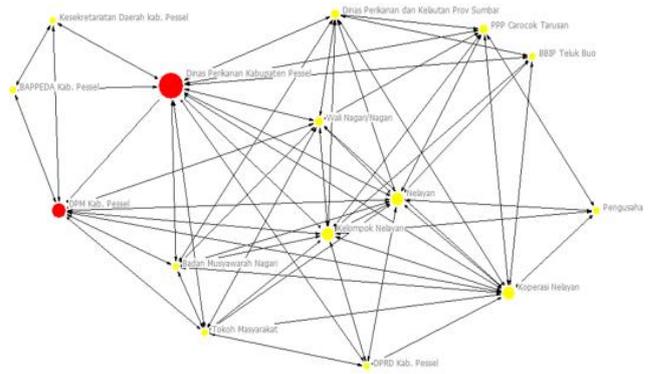
Centralization menunjukkan kedudukan pihak dalam suatu jaringan. Skor sentralisasi 1 menunjukkan bahwa jumlah hubungan

maksimum yang terkonsentrasi pada satu pihak, dan skor 0 menunjukkan jaringan sepenuhnya terhubung satu sama lain antar pihak. *Degree centrality* mengacu pada jumlah hubungan yang diterima atau yang keluar dari sebuah entitas (pihak). Sedangkan *betweenness centrality* mengacu pada peran sebuah entitas (pihak) menjadi jembatan terpendek yang menghubungkan dua pihak lainnya yang terputus.

Molano & Polo (2015) menyatakan jika proporsi dari hubungan yang hadir dalam jaringan bisa diukur dengan melakukan penghitungan terhadap kepadatan jaringan. Berdasarkan hasil yang kami olah dari penelitian yang dilakukan oleh Maani et al (2018) dan Jumiati & Fajri (2018) didapatkan nilai dari kepadatan jaringan sebesar 0, 276 dengan jumlah hubungan yang ada sebanyak 105.

Nilai kepadatan yang didapat ini menjelaskan jika jaringan sosial yang terdapat di dalam pengelolaan pemberdayaan nelayan di Kabupaten Pesisir Selatan tidak termasuk ke dalam jaringan yang lengkap (nilai kepadatan jaringan lengkap = 1). Kepadatan dari sebuah jaringan dapat diartikan sebagai bentuk distribusi dari hubungan yang terjadi di dalam jaringan, keterhubungan dari seluruh jaringan, serta kecepatan dari penyebaran informasi antar pihak di dalamnya (Ilham et al., 2017).

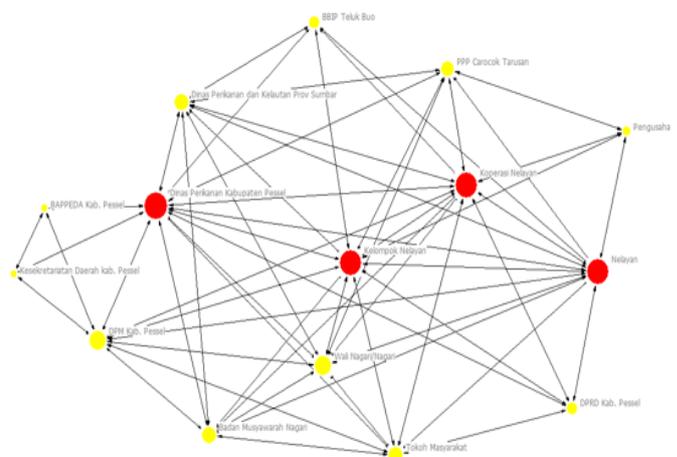
Posisi para pihak di dalam jaringan pengelolaan pemberdayaan nelayan di Kabupaten Pesisir Selatan dapat diperoleh melalui analisis *centralization*. Indikator yang dipakai di dalam melakukan analisis pada penelitian ini yaitu *degree centrality* dan *betweenness centrality*.



Gambar 2. *Degree Centrality* relasi informasi para pihak dalam jaringan pengelolaan Pemberdayaan Nelayan di Kabupaten Pesisir Selatan

Sumber: Diolah dari Penelitian (Maani et al., 2018) dan (Jumiati & Fajri, 2018)

Degree centrality merupakan saluran utama atau yang menjadi titik pusat komunikasi dan informasi di dalam jaringan. Pihak yang memiliki *degree centrality* tertinggi di dalam jaringan pengelolaan pemberdayaan nelayan di Kabupaten Pesisir Selatan adalah Dinas Perikanan Kabupaten Pesisir Selatan dan kemudian disusul Dinas Pemberdayaan Masyarakat (DPM Kabupaten Pesisir Selatan). Sehingga, kedua pihak tersebut merupakan pihak-pihak yang paling memahami tentang informasi dan pengetahuan tata kelola pemberdayaan nelayan di Kabupaten Pesisir Selatan (lihat gambar 2).



Gambar 3. *Betweenness centrality* relasi Informasi Para Pihak dalam Jaringan Pengelolaan Pemberdayaan Nelayan di Kabupaten Pesisir Selatan

Sumber: Diolah dari Penelitian (Maani et al., 2018) dan (Jumiati & Fajri, 2018)

Betweenness centrality merupakan ukuran untuk melihat pihak yang mampu untuk menjadi penghubung informasi dan komunikasi diantara para pihak. Gambar 3 memperlihatkan bahwa pihak yang memiliki *betweenness centrality* yang paling tinggi yaitu Dinas Perikanan Kabupaten Pesisir Selatan, kelompok nelayan, koperasi nelayan, dan nelayan. Kelompok nelayan, koperasi nelayan dan nelayan notabeneanya adalah obyek di dalam pengelolaan pemberdayaan memiliki potensi untuk memainkan peran sebagai penghubung di dalam jaringan. Tetapi disayangkan mereka cenderung

tidak memiliki kemampuan secara kapasitas untuk itu.

Terlihat Dinas Perikanan Pesisir Selatan memainkan posisi yang sangat strategis di dalam pengelolaan pemberdayaan nelayan di Kabupaten Pesisir Selatan. Selain merupakan *key player*, pihak yang menjadi pusat informasi dan komunikasi, juga berperan sebagai pihak yang mampu menjadi penghubung informasi dan komunikasi. Dengan kata lain, Dinas Perikanan Kabupaten Pesisir Selatan merupakan pihak yang mengendalikan pemberdayaan nelayan di Kabupaten Selatan. Sehingga, persepsi mereka sangat berpengaruh di dalam tata kelola pemberdayaan nelayan di Kabupaten Pesisir Selatan

Tabel 1. Persepsi *Stakeholder* di dalam Pengelolaan Pemberdayaan Nelayan di Kabupaten Pesisir Selatan

| Kategori Keterlibatan | Tujuan | Langkah dan strategi | Opsi |
|-----------------------|--|---|---|
| <i>Key Player</i> | Meningkatkan kesejahteraan nelayan; Mengurangi ketegantungan nelayan pada hasil laut; Meningkatkan sosial-ekonomi nelayan; Memelihara ekologis laut. | Menyediakan diversifikasi ekonomi nelayan dengan program budidaya dan pariwisata; Memberikan bantuan alat tangkap; | Perlunya penguatan kelembagaan di dalam pengelolaan pemberdayaan dengan melibatkan pihak-pihak lain yang memiliki kepentingan di dalam pemberdayaan nelayan |
| <i>Subject</i> | Meningkatkan ekonomi nelayan; Memandirikan nelayan; Meningkatkan sosio-kultural-religius nelayan. | Memperkuat kelompok dan koperasi nelayan; Mengusulkan kebutuhan dalam peningkatan kapasitas nelayan; Memberikan pendampingan kepada nelayan | Pemberdayaan nelayan yang lebih berkelanjutan dan terencana dengan memperhatikan partisipasi nelayan |
| <i>Context Setter</i> | Mengurangi jumlah rumah tangga miskin nelayan; Membangun kapasitas nelayan; Mengurangi perusakan lingkungan. | Perencanaan kebijakan yang lebih responsif terhadap perbaikan kondisi ekonomi nelayan; Mengalokasikan anggaran untuk kegiatan pemberdayaan; | Perlunya kebijakan pengelolaan pemberdayaan yang lebih menyentuh kebutuhan nelayan dengan memperhatikan ekosistem laut. |

| | | | |
|--------------|---|--|--|
| | | Mengawasi <i>illegal fishing</i> ; Menyediakan pasar untuk hasil tangkap nelayan; Mengawasi penggunaan alat tangkap yang merusak ekosistem laut. | |
| <i>Crowd</i> | Meningkatkan kesejahteraan nelayan; Meningkatkan pembangunan manusia; Menyediakan mata pencaharian alternatif bagi nelayan; Mengurangi ketergantungan nelayan terhadap hasil laut. | Menyediakan bibit ikan untuk dibudidayakan oleh nelayan; Bekerjasama dengan pihak kunci di dalam pengelolaan pemberdayaan nelayan; Menyusun rencana pembangunan khusus nelayan; Penyediaan pasar bagi hasil tangkap dan budidaya nelayan. | Perlunya pengelolaan yang melibatkan pihak-pihak yang memiliki kepentingan di dalam pemberdayaan nelayan |

Sumber: Diolah dari Penelitian (Maani et al., 2018) dan (Jumiati & Fajri, 2018)

Collaborative Governance sebagai Sebuah Solusi

Hasil dari analisis *stakeholder* dan analisis jaringan sosial memperlihatkan adanya relasi pengaruh dan kepentingan serta relasi informasi yang tidak setara di antara pemangku kepentingan (*stakeholder*) yang ada. Kondisi ini tentu apabila dibiarkan akan membuat tujuan dari pemberdayaan nelayan tidak akan tercapai karena tidak adanya sinergitas antara pemangku kepentingan (Isakh et al., 2020).

Pada tabel 1 memperlihatkan bahwa semua pihak mempersepsikan bahwa pemberdayaan nelayan memiliki tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan nelayan, selain juga untuk tujuan-tujuan lain seperti menjaga ekologis dari pengrusakan yang dilakukan nelayan di dalam melakukan penangkapan ikan, dan mengurangi ketergantungan nelayan terhadap hasil laut. Meski begitu para pihak memiliki persepsi yang berbeda tentang langkah

dan strategi yang harus mereka lakukan di dalam pencapaian tujuan.

Perbedaan strategi tersebut mengkonfirmasi bahwa masing-masing pihak tidak memiliki pemahaman yang sama terhadap masalah yang ada di dalam pengelolaan pemberdayaan nelayan. Sehingga, selama ini pengelolaan terhadap pemberdayaan nelayan sering berbentuk kegiatan insidental dari masing-masing pihak dan tidak berkelanjutan.

Meski begitu semua pihak memiliki persepsi yang sama tentang opsi di dalam memperbaiki tata kelola pemberdayaan nelayan di Kabupaten Pesisir Selatan. Mereka berpendapat bahwa yang harus dilakukan adalah perbaikan kelembagaan dengan menciptakan suatu bentuk tata kelola yang mampu melibatkan pihak-pihak yang memiliki kepentingan dan pengaruh di dalam pemberdayaan nelayan. Tata kelola yang baik nantinya akan mampu mewujudkan tujuan pemberdayaan yaitu untuk mewujudkan kemandirian nelayan, meningkatkan usaha

nelayan, meningkatkan kemampuan dan kapasitas nelayan, dan meningkatkan penumbuhkembangan nelayan.

Model pengelolaan yang paling mungkin memberikan peluang para pihak untuk terlibat secara bersama di dalam sebuah jaringan dan juga merupakan suatu strategi yang inovatif untuk menanggapi berbagai jenis masalah dalam masyarakat kontemporer adalah *collaborative governance* (Huxham & Vangen, 2013). *Collaborative governance* memiliki kemampuan untuk melibatkan bukan saja pihak yang merupakan lembaga pemerintah di dalam satu jaringan tetapi juga pihak-pihak yang non-pemerintah (Ansell & Gash, 2008). Sehingga, kolaborasi merupakan elemen kunci di dalam pembangunan berkelanjutan (Lozano, 2007).

Dinas Perikanan Kabupaten Pesisir Selatan merupakan pihak yang paling mungkin untuk menginisiasi, mengkomunikasikan, dan meyakinkan kepada pihak lain bahwa perlu penataan pemberdayaan nelayan yang lebih kolaboratif diantara para pihak yang berkait. Hal itu sebenarnya bukan suatu hal yang sulit karena semua pihak telah memiliki persepsi tentang perlunya penataan pengelolaan pemberdayaan nelayan di Kabupaten Pesisir Selatan. Persoalannya sekarang terletak pada seberapa serius Dinas Perikanan Kabupaten Pesisir Selatan khususnya untuk mengkomunikasikan hal itu kepada pihak-pihak lainnya. Hal lainnya ialah seberapa kuat respon yang diberikan oleh pihak-pihak lain di dalam menanggapi itu.

PENUTUP

Pemberdayaan nelayan di Kabupaten Pesisir Selatan memiliki lima belas *stakeholder* yang memiliki pengaruh dan kepentingan yang beragam. Perbedaan pengaruh dan kepentingan tersebut membuat relasi yang ada di antara mereka tidak setara sehingga berdampak kepada kemampuan kerjasama antara *stakeholder* menjadi terbatas.

Perbedaan itu kemudian juga membuat persepsi di antara mereka menjadi asimetris tentang strategi dan langkah yang harus mereka lakukan meskipun tujuan dari pemberdayaan yang mereka yakini harus mendatangkan kesejahteraan bagi nelayan, selain juga tujuan-tujuan yang lain.

Beberapa pihak kemudian teridentifikasi sebagai pihak yang memainkan peranan sebagai pihak yang memiliki pengaruh dan kepentingan yang paling tinggi. Jika ditambahkan dengan kapasitas yang mereka miliki di dalam jaringan pemberdayaan nelayan, maka pihak yang paling penting adalah Dinas Perikanan Kabupaten Pesisir Selatan. Hal ini membuat posisi mereka sangat strategis untuk menentukan bentuk pengelolaan pemberdayaan di masa depan.

Salah satu bentuk dari opsi pengelolaan pemberdayaan yang dapat dijadikan sebagai solusi adalah model *collaborative governance*. Dengan alasan model ini memberikan peluang bagi stakeholder untuk bersama-sama melakukan pengelolaan pemberdayaan nelayan di dalam satu forum. Meskipun untuk itu memerlukan proses yang memakan waktu (Imperial, 2005; Warner, 2006) karena perlu terlebih dahulu membangun konsensus diantara *stakeholder* (Coglianese & Allen, 2003; Yaffee & Wondolleck, 2003). Sehingga, *collaborative governance* bukan pilihan yang baik jika implementasi dituntut untuk cepat (Ansell & Gash, 2008). Tetapi hasil penelitian memperlihatkan bahwa sesungguhnya para pihak sudah memiliki persepsi ke arah pembangunan kolaborasi. Sehingga yang dituntut sekarang adalah komitmen dari masing-masing pihak untuk mewujudkan itu terutama dari pihak-pihak yang teridentifikasi sebagai *key players* serta yang menjadi titik informasi di dalam penelitian ini.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis menyampaikan penghargaan yang tinggi dan terima kasih kepada Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Universitas Negeri Padang yang telah membiayai penelitian ini dengan nomor kontrak penelitian: 172/UN35/LT/2018. Serta kepada pihak-pihak yang sudah mendukung kelancaran penelitian ini terkhusus kepada Qori Pebrial Ilham yang sudah membantu pengolahan data. Adapun korespondensi dengan penulis dapat dilakukan pada email hidayatulfajri@fis.unp.ac.id.

DAFTAR PUSTAKA

- Achyar, E., Schmidt-Vogt, D., & Shivakoti, G. P. (2017). Dynamics and Effectiveness of the Multistakeholder Forum in Promoting Sustainable Forest Fire Management Practices in South Sumatra, Indonesia. *Redefining Diversity and Dynamics of Natural Resources Management in Asia, 1*, 157–174. <https://doi.org/10.1016/B978-0-12-805454-3.00010-4>
- Alonso Roldán, V., Villasante, S., & Outeiro, L. (2015). Linking marine and terrestrial ecosystem services through governance social networks analysis in Central Patagonia (Argentina). *Ecosystem Services, 16*, 390–402. <https://doi.org/10.1016/J.ECOSER.2015.02.010>
- Ansell, C., & Gash, A. (2008). Collaborative Governance in Theory and Practice. *Journal of Public Administration Research and Theory, 18*(4), 543–571. <https://doi.org/10.1093/JOPART/MUM032>
- Berket, N., Challenger, I., Sinner, J., & Tadaki, M. (2013). *Values, collaborative processes and indicators for freshwater planning*.
- Bevir, M. (2010). *Democratic Governance*. <https://doi.org/10.1515/9781400836857>
- BIG. (2017). *Pentingnya Informasi Spasial untuk Menata Laut Indonesia*. <http://big.go.id/berita-surta/show/pentingnya-informasi-geospasial-untuk-menata-laut-indonesi>
- Bono, E. De. (2000). *New Thinking for the New Millennium*. New Millennium Entertainment.
- BPS. (2014). Pertumbuhan Ekonomi Indonesia: Pertumbuhan PDB Tahun 2013 Mencapai 5,78 Persen. *Berita Resmi Statistik, 16/02/Th. XVII*, 1–9.
- Can, U., & Alatas, B. (2019). A new direction in social network analysis: Online social network analysis problems and applications. *Physica A: Statistical Mechanics and Its Applications, 535*, 122372. <https://doi.org/10.1016/J.PHYSA.2019.12.2372>
- Coglianese, C., & Allen, L. K. (2003). *Penn Law : Legal Scholarship Repository Building Sector-Based Consensus : A Review of the EPA 's Common Sense Initiative*.
- Dryzek, J. (2010). *Foundations and Frontiers of Deliberative Governance*. Oxford University Press.
- Emerson, K., Nabatchi, T., & Balogh, S. (2012). An Integrative Framework for Collaborative Governance. *Journal of Public Administration Research and Theory, 22*(1), 1–29. <https://doi.org/10.1093/JOPART/MUR011>
- Fajri, H., Akmal, A. D., & Nurhabibi, P. (2019). ANALISIS STAKEHOLDER DALAM KONFLIK REVITALISASI EMPLACEMENT STASIUN KERETA API. *Jurnal Kebijakan Publik, 10*(2), 61–66. <https://doi.org/10.31258/JKP.10.2.P.61-66>
- Fajri, H., Akmal, A. D., Saputra, B., Maani, K.

- D., Permana, I., Wahyuni, N., & Syafril, R. (2020). Peningkatan Keterlibatan Stakeholder Dalam Perumusan Peraturan Nagari Layak Anak. *Dinamisia : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 4(4), 754–761.
<https://doi.org/10.31849/DINAMISIA.V4I4.4550>
- Farazmand, A. (2004). *Sound Governance: Policy and Administrative Innovation* (A. Farazmand (ed.)).
- Fletcher, S. (2000). *Competence-based assessment techniques*. 99.
- Gonsalves, J., Becker, T., Braun, A., Campilon, D., de Chaves, H., Fajber, E., Capiriri, M., Caminade, J. R., & Vernoooy, R. (2005). *Participatory Research and Development for Sustainable Agricultural and Natural Resource Management: A resource book (glossary)*. International Potato Center-Users Perspective with Agricultural Research and Development.
- Hooghe, L., & Marks, G. (2014). *Types of Multi-Level Governance*. January.
- Huxham, C., & Vangen, S. (2013). Managing to Collaborate : The Theory and Practice of Collaborative Advantage. *Managing to Collaborate: The Theory and Practice of Collaborative Advantage*, 1–271.
<https://doi.org/10.4324/9780203010167>
- IDEO. (2010). *The Field Guide to Human-Centered Design*.
<https://www.ideo.com/post/design-kit>
- Ikeanyibe, O. M., Ori, O. E., & Okoye, A. E. (2017). Governance paradigm in public administration and the dilemma of national question in Nigeria. *Http://Www.Editorialmanager.Com/CogentSocsci*, 3(1), 1316916.
<https://doi.org/10.1080/23311886.2017.1316916>
- Ilham, Q. P., Purnomo, H., & Nugroho, T. (2017). Analisis Pemangku Kepentingan dan Jaringan Sosial Menuju Pengelolaan Multipihak di Kabupaten Solok, Sumatera Barat. *Jurnal Ilmu Pertanian Indonesia*, 21(2), 114–119.
<https://doi.org/10.18343/jipi.21.2.114>
- Imperial, M. T. (2005). Using Collaboration as a Governance Strategy: Lessons From Six Watershed Management Programs. *Administration & Society*, 37(3), 281–320.
<https://doi.org/10.1177/0095399705276111>
- Indarti, I. (2015). MODEL PENINGKATAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT PESISIR MELALUI PENGUATAN KELEMBAGAAN KOPERASI NELAYAN BERKELANJUTAN. *Jurnal Dinamika Ekonomi & Bisnis*, 12(1).
<https://doi.org/10.34001/JDEB.V12I1.379>
- Iqbal, M. (2007). Analisis Peran Pemangku Kepentingan dan Implementasinya Dalam Pembangunan Pertanian. *Jurnal Litbang Pertanian*, 26(3), 89–99.
<http://pustaka.litbang.pertanian.go.id/publikasi/p3263071.pdf>
- Isakh, I. H., Rossa, J. C., Narendragharini, K. S., & Putri, K. S. (2020). Kolaborasi dalam Program Inovasi Pembangunan dan Pemberdayaan Kewilayahan di Kelurahan Babakan Ciparay. *Ministrate: Jurnal Birokrasi Dan Pemerintahan Daerah*, 2(2), 87–98.
<https://doi.org/10.15575/JBPD.V2I2.9386>
- Jumiati, J., & Fajri, H. (2018). Modal Sosial: Seberapa Penting di dalam Keberhasilan Pemberdayaan Nelayan. *Jurnal Teori Dan Riset Administrasi Publik*, 2(2), 70–79.
- Kartasasmita, G. (1996). *Power and Empowerment: Sebuah Telaah Mengenai Konsep Pemberdayaan Masyarakat*. Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.
- Knoke, D., & Yang, S. (2008). *Social Network Analysis* (Second). Sage Publications.

- Kooiman, J. (1993). *Modern Governance: New Government-Society Interactions*. Sage Publications.
- Lasabuda, R. (2013). PEMBANGUNAN WILAYAH PESISIR DAN LAUTAN DALAM PERSPEKTIF NEGARA KEPULAUAN REPUBLIK INDONESIA. *Jurnal Ilmiah PLATAX*, 1(2), 92–101.
<https://doi.org/10.35800/JIP.1.2.2013.1251>
- Lozano, R. (2007). Collaboration as a pathway for sustainability. *Sustainable Development*, 15(6), 370–381.
<https://doi.org/10.1002/SD.322>
- Maani, K. D., Firdaldi, A., & Fajri, H. (2018). Fisherman empowerment and poverty in Pesisir Selatan regency. *MATEC Web of Conferences*, 229, 01004.
<https://doi.org/10.1051/MATECCONF/201822901004>
- Mah, D. N., & Hills, P. (2012). Collaborative governance for sustainable development: wind resource assessment in Xinjiang and Guangdong Provinces, China. *Sustainable Development*, 20(2), 85–97.
<https://doi.org/10.1002/SD.466>
- Molano, S., & Polo, A. (2015). Social Network Analysis in a Learning Community. *Procedia - Social and Behavioral Sciences*, 185, 339–345.
<https://doi.org/10.1016/J.SBSPRO.2015.03.381>
- Osborne, D. (1993). Reinventing Government. *Public Productivity & Management Review*, 16(4), 349.
<https://doi.org/10.2307/3381012>
- Perikanan, D. K. dan. (2001). *Buku Pedoman Umum Program PEMP*.
- Prell, C., Hubacek, K., & Reed, M. (2009). Stakeholder Analysis and Social Network Analysis in Natural Resource Management.
[Http://Dx.Doi.Org/10.1080/08941920802199202](http://Dx.Doi.Org/10.1080/08941920802199202), 22(6), 501–518.
<https://doi.org/10.1080/08941920802199202>
- Pustek Kelautan UGM. (2005). *Potensi Perikanan di Pesisir dan Laut Selatan Provinsi DIY*.
- Ratnawati, S., & Sutopo, H. H. (2014). the Development of Model Empowerment Poor Society in Coastal Area Through Net Marketing. *Academic Research International*, 5(1), 237–243.
- Reed, M. S., Graves, A., Dandy, N., Posthumus, H., Hubacek, K., Morris, J., Prell, C., Quinn, C. H., & Stringer, L. C. (2009). Who's in and why? A typology of stakeholder analysis methods for natural resource management. *Journal of Environmental Management*, 90(5), 1933–1949.
<https://doi.org/10.1016/J.JENVMAN.2009.01.001>
- Rhodes, R. A. (2007). Understanding governance: Ten years on. *Organization Studies*, 28(8), 1243–1264.
- RI, S. W. P. (2011). *Pendataan Rumah Tangga Miskin di Wilayah Pesisir/Nelayan*.
- Sahubawa, L., Khakim, N., & Lasindrang, M. (2015). *Yogyakarta Sebagai Upaya Percepatan Investasi*. 4(2), 101–120.
- Shafique, K., & Warren, C. M. J. (2018). Empowerment and legitimization of effected communities in post-disaster reconstruction. *Procedia Engineering*, 212, 1171–1178.
<https://doi.org/10.1016/J.PROENG.2018.01.151>
- Shah, N., Napier, C. J., & Holloway, R. (1992). *The Cadbury Report 1992: Shared Vision and Beyond*.
<https://www.frc.org.uk/News-and-Events/FRC->

- Press/Press/2014/September/FRC-updates-UK-Corporate-
- Shen, B., Guan, T., Ma, J., Yang, L., & Liu, Y. (2021). Social network research hotspots and trends in public health: A bibliometric and visual analysis. *Public Health in Practice*, 2, 100155. <https://doi.org/10.1016/J.PUHIP.2021.100155>
- Smith, S., & Smyth, J. (2010). Introduction The (New) Public Governance: a suitable case for treatment? *The New Public Governance?: Emerging Perspectives on the Theory and Practice of Public Governance*, 17–32. <https://doi.org/10.4324/9780203861684-7>
- Soeprijadi, L., Yuli, E., Susilo, E., & Rudianto, R. (2013). Fishermen Community Economic Empowerment through Joint Development Business Group in Cirebon City. *International Journal of Marine Science*. <https://doi.org/10.5376/IJMS.2013.03.0035>
- Suhartini, R., Halim, A., Khambali, I., & Basyid, A. (2005). *Model-Model Pemberdayaan Masyarakat*.
- Syahrizal, S., Meiyenti, S., & Ekaputra, R. (2012). Aspek Tindakan dan Perilaku dalam Kemiskinan: Studi pada Masyarakat Nelayan Kabupaten Pesisir Selatan Sumatera Barat. *Humanus*, 10(1), 25. <https://doi.org/10.24036/jh.v10i1.483>
- Visseren-Hamakers, I. J., & Glasbergen, P. (2007). Partnerships in forest governance. *Global Environmental Change*, 17(3–4), 408–419. <https://doi.org/10.1016/J.GLOENVCHA.2006.11.003>
- Wakka, A. K. (2014). ANALISIS STAKEHOLDERS PENGELOLAAN KAWASAN HUTAN DENGAN TUJUAN KHUSUS (KHDTK) MENGENDEK, KABUPATEN TANA TORAJA, PROVINSI SULAWESI SELATAN (Stakeholders Analysis of the Management Mengkendek Forest for Special Purpose (KHDTK Mengkendek), Tana Toraja Di. *Jurnal Penelitian Kehutanan Wallacea*, 3(1), 47–56.
- Warner, J. F. (2006). More Sustainable Participation? Multi-Stakeholder Platforms for Integrated Catchment Management. *Water Resources Development*, 22(1), 15–35. <https://doi.org/10.1080/07900620500404992>
- World Bank. (1992). *Governance and Development*.
- Yaffee, S. L., & Wondolleck, J. M. (2003). Collaborative ecosystem planning processes in the United States: evolution and challenges. *Environments*, 31(2), 59–73. <https://go.gale.com/ps/i.do?p=AONE&sw=w&issn=07116780&v=2.1&it=r&id=GALE%7CA111855599&sid=googleScholar&linkaccess=fulltext>
- Yang, Z., Ju, M., Zhou, Y., Wang, Q., & Ma, N. (2010). An Analysis of Greenhouse Gas Emission Trading System from the Perspective of Stakeholders. *Procedia Environmental Sciences*, 2, 82–91. <https://doi.org/10.1016/J.PROENV.2010.10.012>
- Zamzami, L. (2011). Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir di Nagari Ampiang Perak, Sumatera Barat. *MIMBAR*, XXVII(1), 113–124. <https://media.neliti.com/media/publications/7414-ID-pemberdayaan-ekonomi-masyarakat-pesisir-di-nagari-ampiang-perak-sumatera-barat.pdf>